



## UNCAK

### Persoalkan Dua Versi

**DAFTAR** calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipersoalkan Dewan Per-



Oesman Sapta Odang

wakilan Daerah (DPD). Pasalnya, ada dua versi daftar calon yang diterima dari DPR RI. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam memberikan pertimbangan, para senator pun meminta DPR menyepakati satu versi.

Sebelumnya, Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) menerima Surat Ketua DPR Nomor PW/14238/DPR RI/VIII/2019 tentang Pencalonan Anggota BPK yang tertanggal 29 Agustus 2019. Yang janggal, dalam surat itu ada dua versi daftar calon anggota BPK. Satu daftar berisi 32 nama calon, daftar lainnya berisi 62 nama calon anggota BPK.

Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang angkat bicara terkait persoalan tersebut. Menurut dia, pimpinan DPD telah merumuskan balasan surat kepada pimpinan DPR. Dalam surat tersebut, DPD meminta ketegasan DPR untuk mengirimkan satu versi nama-nama calon anggota BPK yang akan mendapatkan pertimbangan DPD.

Ajiep meminta agar lembaganya tidak dilibatkan dalam polemik di internal DPR. Menurut dia, Komite VI DPD akan menindaklanjuti surat dan memberikan pertimbangan terhadap nama-nama calon anggota BPK yang diajukan, jika DPR sudah satu suara. "Tidak ada perbedaan pandangan antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi XI, serta fraksi-fraksi yang ada di sana," ujarnya saat dihubungi kemarin (30/9)

Senator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mengatakan, ketidaktegasan DPR dalam menyikapi seleksi calon anggota BPK berdampak besar terhadap tahapan dan batas waktu pemilihan calon anggota BPK. (lum)